Jonathan Glazzard, Jane Stokoe,
Alison Hughes, Annette Netherwood,
dan Lesley Neve

Asih Asah Asuh

Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar

Jonathan Glazzard, Jane Stokoe,
Alison Hughes, Annette Netherwood,
dan Lesley Neve

Asih Asah Asuh

Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar

PENERBIT PT KANISIUS

Asih Asah Asuh Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar

1016002182

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
E-mail : office@kanisiusmedia.com
Website : www.kanisiusmedia.com

Cetakan ke-	5	4	3	2	1
Tahun	20	19	18	17	16

Merupakan terjemahan dari buku *"Teaching & Supporting Children with Special Educational Needs & Disabilities in Primary Schools (2nd edition)"* karya Jonathan Glazzard, Jane Stokoe, Alison Hughes, Annette Netherwood, & Lesley Neve, yang diterbitkan pertama kali oleh SAGE Publication, London, 2015

Penerjemah : Ony Suryaman
Editor : Ganjar Sudibyo, Emmy Lestari
Desainer isi : Marini
Desainer cover : Hermanus Yudi

ISBN 978-979-21-4946-3

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

DAFTAR ISI

TENTANG PENGARANG

Jonathan Glazzard, seorang yang bertangung jawab penuh untuk Pelatihan Guru Muda di Pendidikan Dasar di Universitas Huddersfield. Ia memimpin kursus untuk jurusan QTS *(Qualified Teacher Status)* dasar dan mengajar untuk program MA. Jonathan bekerja di Universitas Huddersfield sejak tahun 2005. Sebelumnya, ia bekerja sebagai guru sekolah dasar dan menjadi asisten Kepala Guru di Barnsley selama 10 tahun. Di tengah kesehariannya di sekolah, Jonathan menjadi koordinator kebutuhan pendidikan khusus. Selain memimpin kursus QTS dasar di Huddersfield, ia mengajar pendidikan khusus dan inklusif di universitas tersebut. Saat ini, ia menggunakan pendekatan naratif untuk penelitian tesisnya tentang pendidikan inklusif.

Jane Stokoe, seorang guru senior berpengalaman lebih dari 30 tahun yang mengajar di semua kelas pendidikan dasar. Pada tahun-tahun terakhir, ia memilih bekerja di Foundation Stage dan Key Stage 1 (setara TK di Indonesia). Kini ia menikmati perannya sebagai seorang asisten kepala dan seorang SENCO untuk sebuah sekolah dasar di Barnsley. Ia bemitra dengan Universitas Huddersfield dalam mendukung guru-guru peserta pelatihan, suatu peran yang sangat ia kagumi. Pengalaman lain-nya termasuk bekerja dan mendukung perencanaan kurikulum Awal Tahun dalam implementasi pelatihan efektivitas dalam penyampaian fonik sintetik. Jane telah bekerja sepanjang kariernya demi perkembangan praktik inklusif bagi semua anak-anak. Ia berkomitmen mengembangkan strategi untuk mendukung kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Alison Hughes, seorang dosen senior Universitas Huddersfield untuk BA (Hons) kursus Pendidikan Dasar Usia Dini. Ia berkarier sebagai pengajar selama 34 tahun. Sekarang, ia menjadi pensiunan universitas. Ia pernah menjadi seorang kepala pengajaran dari sebuah sekolah dasar selama 11 tahun, selama waktu itu ia bekerja dengan para kepala pada sejumlah kerjasama dan seorang fasilitator untuk program *National College for School Leadership Leading Primary Schools*. Ia telah memiliki berbagai pengalaman mengajar lainnya yang meliputi bekerja untuk penerimaan para siswa Key Stage 1 dan Key Stage 2. Ia mempunyai sebuah minat yang besar pada kebutuhan pendidikan khusus. Ia menghabiskan waktunya sebagai seorang guru penanggung jawab untuk kelas gangguan pendengaran. Pada awal kariernya, ia pernah bekerja di pendidikan menengah di Bradford, Inner London, dan Bedford.

Annete Netherwood, seorang yang telah memiliki banyak pengalaman dalam mengajar pendidikan kebutuhan khusus untuk para siswa, baik di sekolah umum

maupun khusus. Ia juga pernah menjadi dosen untuk pengembangan kebutuhan khusus dan fasilitator profesional awal untuk pelatihan QTS di Universitas Huddersfield. Ia memperoleh gelar MA dalam penelitiannya yang mengeksplorasi metode pengajaran dan pembelajaran efektif untuk para siswa berkebutuhan khusus. Ia juga telah memberikan kontribusi kepada Lembaga Kewarganegaraan yang mengajar kewarganegaraan kepada para siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, ia juga pernah menjadi asosiasi penelitian National College untuk Sekolah Kepemimpinan yang mengarah ke publikasi penelitian yang dieksplorasi dengan desain kurikulum yang inovatif. Baru-baru ini ia pensiun mengajar dan sedang belajar untuk program pendidikan doktor di Universitas Sheffield.

Lesley Neve, seorang yang kini telah menjadi pensiunan dosen senior di Universitas Huddersfield. Ia memiliki pengalaman yang lama dalam mengajar di semua jenjang pendidikan. Di tahun-tahun terakhir, ia memilih bekerja dalam bidang kepelatihan guru, baik di Foundation Stage maupun di Key Stage 1 serta di Lifelong Learning. Selain bekerja bersama para peserta pelatihan di Huddersfield, Lesley juga ditempatkan untuk kelas kebutuhan khusus. Ketertarikannya termasuk membangun jaringan aksesbilitas dan teknologi ke dalam pola pengajaran. Lesley adalah mantan penderita disleksia yang sebelumnya pernah bekerja sebagai SENCO.

BAGIAN I

MEMAHAMI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

1

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR?

Tujuan Bab

Bab ini meliputi:

- sejarah yang mengatur anak berkebutuhan khusus (ABK) di Inggris,
- kewajiban hukum sekolah dan pemerintahan setempat,
- aspek-aspek kunci dalam *Code of Practice 2014* (juklak yang berlaku di Inggris).

Standardisasi Guru

Bab ini mengacu pada standardisasi guru.
Bagian 2: Guru harus memiliki pemahaman dan selalu bertindak dalam kerangka kerja hukum yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab profesional mereka.

Pendahuluan

Bab ini akan memperkenalkan secara singkat mengenai sejarah perkembangan pendidikan inklusi di Inggris. Bab ini juga akan memeriksa konteks kebijakan terkini terkait dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan mendiskusikan *Code of Practice for SEN* (*DfE*, 2014) terbaru.

Sejarah

Undang-undang Pendidikan 1972 (*Education Act* 1972) telah memberikan hak atas pendidikan kepada semua anak; betapapun beratnya disabilitas yang disandangnya. Setelah dikeluarkannya kebijakan ini, banyak lembaga pendidikan setempat berjuang sendiri tanpa tuntunan untuk melayani pendidikan ABK dan sebagian besar kegiatan ini berpusat pada sekolah luar biasa (Warnock, 2005). Pada tahun 1974 Margaret Thatcher sebagai Menteri Pendidikan pada saat itu membuat *Committee of Inquiry into the Education of Handicapped Children and Young People* (Komite Pemeriksa Masalah Pendidikan Anak dan Remaja Cacat) untuk meninjau pendidikan ABK.

Mary Warnock memimpin komite ini dan memberikan rekomendasi yang dipublikasikan sebagai *Warnock Report* pada tahun 1978 (DES/Warnock 1978). Laporan ini memperkenalkan istilah "*special education needs*" (pendidikan anak berkebutuhan khusus) dan memberikan rekomendasi agar bilamana mungkin, ABK bisa disekolahkan di sekolah umum. Konsep integrasi ini diciptakan dengan berfokus sebagian besar pada asimilasi murid yang berkebutuhan khusus ke dalam sekolah umum. Integrasi ini sedikit atau hampir tidak membebankan tanggung jawab kepada sekolah untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian dalam memenuhi kebutuhan murid yang berkebutuhan khusus. Sebaliknya, murid yang berkebutuhan khusus, diharapkan beradaptasi dengan sistem pendidikan yang hampir tidak diubah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Rekomendasi dari *Warnock Report* ini menjadi dasar penyusunan Undang-undang Pendidikan 1981 (*Education Act* 1981) yang mulai memberikan dana bantuan jaringan pengaman sosial untuk mendukung anak yang paling tidak beruntung. Ini dikenal dengan surat keterangan berkebutuhan khusus *(statement of SEN)*. Namun, undang-undang ini tidak mengalokasikan dana tambahan bagi dinas pendidikan setempat untuk melaksanakan prosedur baru tersebut (Warnock, 2005). Akibatnya, para orang tua murid bersengketa dengan dinas pendidikan setempat yang kekurangan dana untuk memperoleh surat pernyataan ABK bagi anak-anak mereka (Warnock, 2005). Beberapa persidangan dibuat pada tahun 90-an untuk menyelesaikan sengketa ini. Warnock di kemudian hari menyatakan secara pribadi bahwa ia sedikit banyak bertanggung jawab atas kejadian ini (Warnock, 2005: 27) ketika mengacu pada proses pembuatan surat keterangan.

Penandatanganan *Salamanca Agreement* (UNESCO, 1994) memberikan sinyal perubahan kebijakan dari integrasi menuju *inklusi* dan menandai sebuah komitmen internasional untuk prinsip pendidikan inklusif. Negara-negara yang menandatangani ini menyetujui prinsip bahwa sekolah umum seharusnya mengakomodasi seluruh anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik dan kondisi lainnya. Ini adalah sebuah perkembangan kebijakan yang penting karena perjanjian ini menempatkan tanggung jawab kepada sekolah supaya lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan murid yang berkebutuhan khusus.

Pada akhir 1980-an dan 1990-an, sekolah berada dalam situasi tumbuhnya ekonomi pasar yang makin kompetitif. Undang-undang Reformasi Pendidikan 1988 (*Education Reform Act* 1988) memperkenalkan Kurikulum Nasional yang disertai kewajiban untuk menyelenggarakan ujian nasional (*Statutory Assessment Test*/ SAT) bagi sekolah dasar dan menengah serta memublikasikan hasil ujian ini dalam sebuah daftar peringkat. Selain itu, semenjak tahun 1990-an, seperangkat sistem pengawasan yang ketat diterapkan sehingga sekolah yang gagal diumumkan serta dipermalukan. Sekolah yang kurang berprestasi ditaruh di bawah "perlakuan khusus" dan harus menjalani proses inspeksi ulang. Sekolah ini diancam akan ditutup apabila

gagal menunjukkan peningkatan. Bisa dikatakan bahwa arus ekonomi pasar yang melanda dunia pendidikan secara garis besar tidak kondusif bagi perkembangan praktik inklusif di sekolah-sekolah. Banyak ahli berkomentar bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, dalam sebuah diskursus untuk menaikkan standar, menghasilkan agenda kebijakan yang bertolak belakang (Warnock, 1996; Armstrong, 1998; Barton 1998).

Meskipun iklim kompetisi ini berlanjut, pemerintahan Partai Buruh di Inggris tetap melanjutkan agenda untuk menaikkan standar ketika mereka terpilih kembali pada tahun 1997 dan pada saat yang sama mengajukan agenda pendidikan inklusif. Lewat rancangan-rancangan kebijakan (DfEE, 1997; DfES, 2004), peraturan perundangan dan agenda mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti *Every Child Matters* (HMSO, 2003), sekolah ditekankan untuk merancang secara lebih proaktif kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid yang beragam. Selain itu juga dituntut secara jelas untuk menjadi semakin inklusif.

Meskipun demikian, menurut Goodley:

> *"Lingkungan pendidikan, isi kurikulum, dan identitas guru semuanya terkait secara normatif dengan lingkungan, standar, dan pencapaian yang bertolak belakang dengan keunikan murid-murid berkebutuhan khusus. Sekolah terus-menerus mengucilkan anak karena ketidakmampuan mereka. Kurikulum menetapkan standar yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh murid dengan (atau tanpa) kekurangan secara fisik atau mental ... Guru-guru dinilai melalui hasil pencapaian yang tinggi ketimbang penghargaan terhadap perbedaan ... Anak-anak dengan disabilitas terus dikucilkan lewat perlakuan khusus, dipisahkan dari rekan sebayanya yang normal melalui keberadaan seorang dewasa yang khusus mendampingi mereka dan tetap tidak terwakili dalam gambaran sekolah dan pencapaian pendidikan."*
>
> (Goodley, 2007: 319)

Oleh karena itu, demi anak-anak berkebutuhan khusus, penting bagi kita untuk melihat sejauh mana kurikulum dan pendekatan penilaian saat ini memarginalisasi dan pada akhirnya mengucilkan mereka.

Suara dari seorang SENCO (Koordinator Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus)

'Inklusi' ... satu kata pendek. Namun saya bergulat untuk mendefinisikan kata ini meskipun kata ini sudah begitu dikenal di dalam profesiku. Jika saya diminta untuk menggantinya dengan sebuah kata lain, maka saya akan menjawabnya dengan "memiliki". Kata lain muncul dalam benakku adalah "penerimaan". Cukup jelas tampaknya kalau saya sendiri tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kata "inklusi" dan meskipun saya percaya sungguh kalau saya ingin "menginklusikan" seluruh anak dalam kelas, saya tidak bisa memaknai apa yang sedang saya kerjakan. Saya tidak menyesal bahwa saya kurang memahami istilah

pendidikan ini. Lewat banyak diskusi dengan teman dan rekan kerja saya, dan juga bahan bacaan, menjadi jelas bagi saya bahwa kata ini sesungguhnya memiliki beberapa makna. Kata ini memiliki makna berbeda bagi masing-masing orang yang pada saat yang sama mungkin bekerja untuk melaksanakan dan mendukung prinsip-prinsipnya. Saya tidak heran, meskipun bekerja di lingkungan yang "inklusif", saya masih merasakannya sebagai sebuah pengalaman yang melelahkan namun menantang.

Ada beberapa aspek dari interpretasi tentang "inklusi" yang saya pegang sepenuh hati. Mengikutsertakan anak-anak adalah memastikan bawah mereka tidak sekadar hadir secara fisik. Saya berjuang menyesuaikan praktik saya untuk memastikan mereka dapat mengakses seluruh aspek pendidikan. Saya melihat ruang kelas sebagai "milik kami". Ruang ini adalah ruang milik kami semua, sebuah ruang tempat kami bertumbuh dan berkembang, dan sebuah ruang tempat kami menikmati rasa memiliki yang kuat. Sekadar rasa memiliki, bagaimanapun, tidak cukup untuk menjelaskan makna inklusi. "Penerimaan" adalah sebuah istilah lain yang dapat memiliki makna yang berbeda bagi tiap orang. Sekarang saya bisa mengakui bahwa penerimaanlah yang menjadi titik sentral dalam pemahaman saya tentang "inklusi". Saya percaya bahwa kami semua mampu melakukan hal-hal yang besar dan kami sama-sama melihat bahwa beberapa aspek kehidupan dan pembelajaran memang menantang. Agenda saat ini dalam kaitannya dengan inklusi, menurut pendapat saya, tidak mendukung penerimaan. Di sana ada sebuah arus besar yang mendorong seluruh anak menuju ke sebuah kriteria sukses yang sempit, begitu sempitnya sehingga ia tidak bisa dipenuhi oleh semua anak. Saya sungguh berjuang untuk bisa menerima perbedaan di antara mereka.

Tugas Refleksi

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan rekan Anda!

- Apakah penekanan pada bahasa Inggris, matematika, dan pencapaian lain terkait usia pada Kurikulum Nasional menjadi penyebab gagalnya sekelompok murid dan berhasilnya kelompok yang lain?
- Bagaimana sistem penilaian di sekolah-sekolah dapat dimodifikasi untuk memperluas makna sebuah kesuksesan dan pencapaian?

Konteks Kebijakan saat ini

Kebijakan tentang anak berkebutuhan khusus (ABK) saat ini berfokus pada pencapaian hasil yang lebih baik bagi murid berkebutuhan khusus. Yang dimaksud dengan hasil akhir, meliputi pencapaian, akses untuk sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, akses untuk pekerjaan, dan hidup secara mandiri setelah dewasa. Di dalam kebijakan ini ada sebuah fokus yang jelas terhadap kewajiban sekolah untuk menghilangkan kesenjangan pencapaian antara murid yang berkebutuhan khusus serta adanya tekanan yang jelas terhadap sekolah dan pengajar untuk menunjukkan pengharapan yang lebih tinggi pada anak berkebutuhan khusus.

White Paper, 2010

White Paper bertajuk *The Importance of Teaching* (DfE[1], 2010) yang dikeluarkan pemerintah meletakkan strategi pemerintahan koalisi tentang pendidikan. Berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, *White Paper* menjanjikan untuk:

- memastikan pengawas sekolah untuk lebih berfokus pada murid berkebutuhan khusus;
- memastikan pengawas sekolah untuk lebih berfokus pada kemajuan murid berkebutuhan khusus dilihat dari titik awal perkembangan mereka;
- meningkatkan pelatihan guru, dengan acuan khusus pada pelatihan pendidikan ABK;
- menekankan budaya menerima pencapaian yang lebih rendah pada kelompok yang kurang beruntung.

Tinjauan Ofsted[2] tentang ABK, 2010

Ofsted meninjau bantuan pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus pada tahun 2010 (Ofsted, 2010). Berikut merupakan poin-poin kunci yang digarisbawahi pada laporan ini.

- Tinjauan Ofsted menemukan bukti bahwa cara perancangan sistem saat ini berkontribusi pada pemerataan buruknya kualitas bantuan bagi ABK.
- Beberapa sekolah dan organisasi bekerja sama dengan baik serta berfokus pada *hasil* untuk remaja.
- Mengawasi kemajuan murid, dengan intervensi yang cepat dan evaluasi mendalam terhadap hasil akhir adalah sesuatu yang penting bagi kesuksesan hasil akhir anak.
- Aspirasi yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk memberdayakan orang muda supaya mereka mampu semandiri mungkin berdampak pada pencapaian pendidikan yang lebih baik.
- Kebutuhan untuk melanjutkan fokus serta pencapaian yang tinggi pada anak dan remaja berkebutuhan khusus bukan saja menjadi isu bagi sekolah dan perguruan tinggi, melainkan juga pada seluruh pelayanan publik, bahkan seluruh badan nasional, termasuk Ofsted sendiri.

Green Paper, 2011

Dokumen pemerintah *Green Paper on SEND* (DfE, 2011) menyatakan bahwa:

- dukungan sistem saat ini terhadap ABK terlalu rumit, terlalu lambat untuk mengidentifikasi masalah, terlalu banyak duplikasi, dan tidak cukup berfokus pada murid dengan kebutuhan khusus;

---

1 Departeman Pendidikan Inggris.
2 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Inggris.

- orang tua melihat bahwa sistem ini terlalu birokratis dan mengeluhkan bahwa suara mereka tidak didengar;
- pendidikan ABK kadang kala "tersamarkan" oleh anak yang tertinggal, dan ini mungkin berkontribusi pada banyaknya jumlah anak yang teridentifikasi sebagai berkebutuhan khusus;
- dengan dukungan yang tepat dan pengajaran berkualitas, ABK dapat didukung untuk mendapatkan hasil akhir yang baik.

Perundang-undangan Saat Ini

Semua lembaga pendidikan harus memenuhi ketentuan pada *Equality Act*[3] 2010 yang mengidentifikasi disabilitas sebagai karakteristik yang perlu dilindungi. Dampaknya adalah sekolah dan lembaga pendidikan lain harus mampu menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan murid dengan disabilitas tidak mengalami diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, lembaga pendidikan harus mampu menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung hubungan yang positif antara kelompok murid yang berbeda. Mereka juga harus menunjukkan mereka telah melakukan penyesuaian bantuan pendidikan yang layak untuk memastikan supaya murid dengan disabilitas mendapat peluang yang sama.

Code of Practice

Code of Practice for Special Education Needs and Disabilities[4] (DfE, 2014) yang baru menggantikan *Code of Practice* (DfES, 2001) yang lama. Di dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) yang baru ini, terdapat fokus yang lebih besar untuk mendukung murid sampai menuju kedewasaan, sehingga juklak ini memberikan perlindungan dan dukungan dari sejak lahir sampai usia 25 tahun. Penguatan partisipasi orang tua dan murid serta peningkatan kolaborasi yang efektif antara lembaga-lembaga lainnya juga mendapatkan fokus yang lebih besar. Berikut disarikan beberapa bagian aspek-aspek kunci dari juklak ini.

Definisi

Code of Practice (DfE, 2014) tidak mengubah definisi dari anak berkebutuhan khusus (ABK).

- Seorang anak atau remaja dinyatakan berkebutuhan khusus apabila mereka memiliki kesulitan belajar atau disabilitas yang membutuhkan bantuan pendidikan yang khusus.

3 Undang-Undang Persamaan Hak
4 Petunjuk Pelaksaan Pendidikan Berkebutuhan Khusus dan Disabilitas

- Seorang anak atau remaja dalam usia wajib belajar dinyatakan memiliki kesulitan belajar atau disabilitas bilamana mereka secara signifikan jauh lebih sulit dalam belajar dibandingkan dengan rekan-rekan seumurnya atau memiliki disabilitas yang menghalangi atau mempersulit mereka dalam menggunakan fasilitas yang biasanya diberikan pada rekan-rekan seumurnya pada sekolah umum.

Prinsip-prinsip Pokok

Prinsip-prinsip pokok pada *Code of Practice* (DfE, 2014) antara lain:

- partisipasi anak, orang tua dan remaja dalam pengambilan keputusan;
- identifikasi dini pada anak dan remaja berkebutuhan khusus serta intervensi dini untuk mendukung mereka;
- pilihan yang lebih banyak dan kendali yang lebih besar bagi remaja serta orang tua dalam mendukung pendidikan;
- kolaborasi antara dinas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam memberikan dukungan;
- bantuan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan anak dan remaja berkebutuhan khusus;
- berfokus pada praktik inklusif dan penghilangan hambatan dalam pembelajaran;
- persiapan mencapai kedewasaan secara sukses, termasuk kemandirian dalam hidup dan pekerjaan.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Mendukung dan melibatkan anak, remaja, dan orang tua mereka dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk dukungan meliputi:

- pandangan, harapan, dan perasaan dari anak dan orang tuanya, atau remaja;
- pentingnya bagi anak, orang tuanya, atau remaja untuk berpartisipasi sepenuh mungkin dalam membuat kebutuhan yang berhubungan dengan identifikasi dan asesmen kebutuhan, bantuan pemerintah setempat dan sekolah, tinjauan kemajuan murid, dan *Education, Health and Care Plans* (*EHC*)[5].
- pentingnya bagi anak, orang tua, atau remaja untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
- kebutuhan untuk menyediakan bagi anak, orang tua, atau remaja informasi yang lengkap dan dapat diakses.

Pasal 12 dan 13 dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (PBB, 1989) menyatakan bahwa anak-anak dan remaja berhak untuk menyatakan pendapat mereka dan diperhitungkan dalam hal-hal yang berdampak pada mereka. Pandangan mereka

5 Semacam program khusus untuk ABK.

harus diperhitungkan sesuai dengan usia, kematangan dan kemampuan mereka. Sekolah harus mencari cara untuk mendukung murid-murid mereka tanpa komunikasi verbal langsung untuk mempermudah mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan pendapat mereka.

Sekolah-sekolah sekarang diharuskan untuk memublikasikan pada laman sekolah mekanisme yang telah dibuat untuk memungkinkan orang tua, murid, dan para remaja untuk mengemukakan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah juga harus menganjurkan orang tua untuk memberikan informasi tentang anak dan remaja tanggungannya. *Code of Practice* (DfE, 2014) secara eksplisit mengatakan bahwa pandangan orang tua tidak boleh dijadikan sebagai otoritas terhadap pandangan anak dan remaja. *Children and Family Act*[6] 2014 memberikan wewenang pada pemerintahan setempat berhubungan dengan remaja secara langsung ketimbang diwakili oleh orang tua mereka setelah mereka menyelesaikan masa wajib belajar. *Code of Practice* (DfE, 2014) mengakui bahwa beberapa murid dan orang tua tidak cukup mampu secara mental untuk mengambil keputusan dan menyampaikan pandangan mereka dan dalam kasus ini pemerintah setempat dan sekolah harus mempertimbangkan adanya kelompok advokasi untuk membantu mereka supaya bisa didengar.

SEN Support (Bantuan Pendidikan untuk ABK)

SEN Support diadakan untuk menggantikan *School Action/School Action Plus*. Bantuan ini adalah bantuan untuk ABK yang tidak termasuk dalam *EHC Plan*.

- Berpusat pada hasil akhir dari bantuan bagi anak dan remaja dan menekankan pada *pendekatan berjenjang* menghadapi kebutuhan mereka.
- Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pengalaman pendidikan dan hasil akhir sekolah bagi seluruh murid dengan memastikan kualitas tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Code of Practice (DfE, 2014) menekankan bahwa bantuan yang dibedakan dan disesuaikan akan memenuhi kebutuhan mayoritas murid. Namun, juklak ini mengakui bahwa ada *beberapa murid* yang membutuhkan bantuan tambahan yang berbeda dengan mayoritas. Juklak ini menekankan bahwa bantuan bagi ABK yang berkualitas ditentukan oleh:

- tingginya kualitas pengajaran;
- tingginya ambisi bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus;
- adanya sasaran yang fleksibel dan menantang bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus;
- adanya sistem yang jelas untuk mengawasi pencapaian sasaran tersebut;

6 Undang-Undang Keluarga dan Anak.

- adanya peninjauan bantuan secara terus-menerus;
- adanya fokus yang jelas;
- adanya fokus untuk perkembangan pribadi, sosial, dan emosional yang positif.

Sekolah-sekolah diharuskan untuk memublikasikan Laporan Informasi ABK yang memuat secara detail pengaturan penerimaan murid baru, proses identifikasi ABK dan mekanisme yang telah diterapkan untuk memungkinkan anak, remaja, dan orang tua berpartisipasi secara penuh di dalam seluruh prosesnya. Selain itu, laporan ini harus memuat detail bantuan yang tersedia di sekolah untuk mendukung ABK.

Sekolah harus mendukung murid dengan cakupan kebutuhan khusus yang luas dan membuat penyesuaian yang layak untuk memungkinkan murid kebutuhan khusus berpartisipasi secara penuh dan memiliki kesempatan seperti murid-murid lainnya. Seperti dimuat dalam *Equality Act* 2010, sekolah berkewajiban untuk mencegah diskriminasi, memajukan persamaan kesempatan, dan mendorong terciptanya relasi yang baik. Ada penekanan yang jelas di dalam juklak supaya guru menetapkan standar pencapaian yang tinggi bagi seluruh murid, terlepas dari pencapaian mereka sebelumnya. Jika kualitas pengajaran tinggi, maka lebih sedikit murid yang membutuhkan bantuan pendidikan secara khusus.

Sekolah diharuskan untuk melakukan asesmen pencapaian dan kemampuan pada saat penerimaan. Juklak secara eksplisit mengatakan bahwa perencanaan yang efektif akan memungkinkan murid dengan kebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum nasional secara penuh. Sekolah perlu memastikan bahwa semua guru memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengidentifikasi murid yang tertinggal dalam pelajaran dan mencacat kondisi pribadi masing-masing. Respons pertama sekolah adalah memastikan kualitas pengajaran yang tinggi yang secara spesifik menyasar bidang yang lemah. Sekolah tidak boleh menunda untuk memberikan pengajaran dan intervensi tambahan bagi murid yang tertinggal dalam pelajaran. Namun, juklak secara spesifik mengatakan sebagai berikut.

- Pencapaian yang rendah dan kemajuan murid yang lambat tidak serta merta menunjukkan bahwa seorang anak memiliki berkebutuhan khusus.
- Pencapaian yang sesuai dengan umur tidak serta merta menunjukkan bahwa seorang anak tidak memiliki kesulitan belajar.
- Perilaku anak yang keras kepala, merusak, dan menarik diri tidak serta merta menunjukkan bahwa seorang anak memiliki kebutuhan khusus.
- Kesulitan yang terjadi semata-mata karena keterbatasan dalam berbahasa Inggris bukanlah sebuah kebutuhan khusus.

Sekolah harus memiliki sebuah pendekatan yang jelas untuk mengidentifikasi dan merespons pendidikan ABK. Mekanisme ini harus membuat sekolah mampu mengidentifikasi kebutuhan secepat mungkin. Di bawah ini empat bidang kebutuhan yang diidentifikasi di dalam *Code of Practice*.

- Kebutuhan komunikasi dan interaksi: termasuk di antaranya murid dengan gangguan spektrum autistik (*autistic spectrum disorder*/ASD) dan gangguan wicara, bahasa dan komunikasi (*speech, language and communication needs*/ SLCN).
- Kebutuhan kognisi dan belajar: termasuk di antaranya murid dengan kesulitan belajar sedang (*moderate learning difficulties*/MLD), kesulitan belajar berat (*severe learning difficulties*/SLD), dan kesulitan belajar berat dan beragam *(profound and multiple learning difficulties),* kesulitan belajar khusus (*special learning difficulties*/ SpLD) yang termasuk di dalamnya disleksia, diskalkulia dan dispraksia.
- Gangguan sosial, emosional dan kesehatan mental: termasuk di dalamnya murid dengan gangguan pemusatan perhatian (*attention deficit disorder*/ADD), gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (*attention deficit hyperactivity disorder*/ADHD), dan gangguan kelekatan.
- Gangguan sensorik dan fisik: termasuk di dalamnya hendaya *(impairment)* penglihatan, hendaya pendengaran, serta hendaya multisensorik.

Kebutuhan bagi anak bisa jatuh pada salah satu atau beberapa kategori di atas. Lembaga pelatihan guru harus memastikan supaya guru magang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memahami cara mendukung murid mengatasi hambatan dalam pembelajaran, partisipasi, dan pencapaian dalam semua bidang di atas. SENCO (koordinator pendidikan ABK) harus memastikan semua guru memiliki akses untuk melanjutkan pengembangan profesional mereka yang berkaitan dengan pendidikan ABK dan SENCO harus secara teratur mengikuti pengembangan profesional untuk membarui pengetahuan dan kemampuan mereka.

Code of Practice (DfE, 2014) secara eksplisit mengatakan bahwa intervensi tambahan dan dukungan tidak dapat menutupi kurangnya kualitas pengajaran. SENCO bersama dengan pimpinan sekolah yang lain memainkan peran vital dalam mengawasi kualitas pengajaran dan pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus. Sebelum para murid teridentifikasi berkebutuhan khusus, para pimpinan sekolah perlu memastikan bahwa mereka telah mendapatkan pengajaran yang berkualitas tinggi secara konsisten. Di saat mereka teridentifikasi berkebutuhan khusus, sekolah harus melaksanakan respons berjenjang untuk memenuhi kebutuhan mereka. SENCO harus memastikan bahwa ada peta bantuan yang jelas untuk mengidentifikasi intervensi dan dukungan yang tersedia bagi murid dengan kebutuhan khusus di seluruh sekolah dan mengelola bantuan ini secara cermat. Ini berarti bahwa intervensi yang tidak membawa dampak bagi kemajuan murid berkebutuhan khusus harus dihentikan dan diganti dengan intervensi yang lebih efektif yang menyasar bidang kebutuhan khusus secara efektif.

Respons Berjenjang

Dalam mengadopsi respons berjenjang bagi murid berkebutuhan khusus, guru dan SENCO harus perlu mengikuti proses sebagai berikut.

- Asesmen: asesmen harus diambil berdasarkan analisis kebutuhan murid, asesmen dan pengamatan guru.
- Perencanaan: orang tua harus diberitahu jika anaknya telah diputuskan untuk mendapatkan dukungan berkebutuhan khusus. Keputusan ini harus dicatat dalam sistem informasi sekolah dan orang tua harus mengetahui rencana dukungan serta intervensi yang akan dilakukan.
- Pelaksanaan: guru kelas tetap bertanggung jawab atas murid yang bersangkutan, walaupun dalam beberapa kasus ada murid yang belajar dengan asisten guru secara sendiri-sendiri atau kadang-kadang sebagai bagian dari satu kelompok. Intervensi yang ditentukan harus dipilih berdasarkan seberapa suksesnya penerapan pada hasil akhir murid.
- Peninjauan: dampak dari intervensi harus bisa diidentifikasi, murid dan orang tua harus terlibat di dalam peninjauan. Sasaran harus diidentifikasi, murid dan orang tua harus terlibat penuh dalam proses penentuan sasaran.

Keputusan mengenai apakah melibatkan atau tidak spesialis dari luar harus didasarkan pada apakah murid mencapai kemajuan kurang dari yang diharapkan walaupun sudah mendapatkan intervensi. Pelibatan spesialis akan sangat tergantung pada bidang kebutuhan, tetapi pada umumnya spesialis dapat mencakup di antaranya psikolog pendidikan, pelayanan kesehatan mental anak dan remaja (*child and adolescent mental health service*/CAMHS), terapis wicara dan bahasa, penasihat dan spesialis pengajaran lainnya, terapis okupasi, fisioterapis dan spesialis perilaku. Kemajuan murid berkebutuhan khusus harus ditinjau secara teratur paling tidak tiga kali setahun dan peninjauan selalu melibatkan anak, remaja, dan orang tua atau seorang pendamping bilamana dibutuhkan.

Tugas Praktik

Selama penempatan di sekolah, identifikasi peluang-peluang yang dapat menambah pemahamanmu tentang peran dan tanggung jawab para profesional yang berbeda dalam mendukung ABK. Mereka termasuk di antaranya psikolog pendidikan, SENCO, terapis wicara dan bahasa, spesialis perilaku, fisioterapis, spesialis hendaya penglihatan dan pendengaran atau profesional dari tim komunikasi dan interaksi. Mungkin masih ada yang belum tercakup. Beberapa dari mereka mungkin memberikan dukungan bagi anak dan pengajar di tempat penempatan Anda. Ada baiknya sediakan waktu senggang untuk berdiskusi dengan mereka tentang peran mereka. Selain itu, Anda mungkin dapat 'membayangi' mereka saat mereka bekerja bersama anak atau profesional yang lain. Setelah mengikuti para profesional dengan keahlian yang berbeda, pertimbangkan secara cermat keahlian mana yang dapat disebarluaskan pada praktisi yang ditempatkan di sekolah dan cara melakukan penyesuaian untuk mengadopsi saran mereka.

Juklak mengatakan bahwa murid tanpa *EHC Plan* harus ditempatkan pada sekolah umum (kecuali dalam kasus tertentu). Ada komitmen yang jelas di dalam juklak terhadap prinsip-prinsip pendidikan inklusif dan untuk menghilangkan hambatan dalam pembelajaran dan partisipasi murid di sekolah umum. *Children and Family Act* 2014 menjamin anggapan umum bahwa ABK akan dididik di sekolah umum. Sekolah tidak boleh menolak murid yang berkebutuhan khusus dengan alasan merasa tidak mampu mendukung kebutuhan mereka atau karena tidak memiliki *EHC Plan*. *Equality Act* 2010 melarang sekolah untuk melakukan diskriminasi terhadap murid dengan disabilitas dalam proses penerimaan murid.

Sekolah harus menciptakan sebuah budaya pencapaian yang tinggi bagi murid yang berkebutuhan khusus dalam sistem yang baru. Murid berkebutuhan khusus harus diberi kesempatan yang sama seperti tersedia pada murid-murid yang tidak berkebutuhan khusus dan sekolah perlu menunjukkan bahwa mereka telah membuat penyesuaian yang layak dalam memenuhi kebutuhan murid berkebutuhan khusus. Sekolah luar biasa masih memiliki peran khusus lewat kerja sama dengan sekolah umum dalam mendukung mereka memenuhi kebutuhan murid berkebutuhan khusus.

Education, Health and Care plans (EHC)

EHC Plan menggantikan surat keterangan yang selama ini mendukung murid yang paling membutuhkan bantuan selama lebih dari 30 tahun. Murid-murid yang selama ini mendapat surat keterangan berkebutuhan khusus akan dipindahkan ke *EHC Plan*. Tujuan dari *EHC Plan* adalah memberikan bantuan pendidikan khusus untuk memenuhi kebutuhan murid yang tidak bisa dipenuhi oleh *SEN Support*. Pemerintah setempat akan melakukan asesmen kebutuhan untuk meninjau kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perawatan murid. Murid yang mendapatkan asesmen tidak secara otomatis mendapatkan *EHC Plan*. Asesmen ini akan meninjau semua bukti yang ada termasuk informasi tentang kemajuan dan pencapaian murid, kepribadian, perkembangan sosial dan emosi mereka, sifat, tingkat dan konteks kebutuhan khusus, serta dampak dari tindakan-tindakan yang telah diambil sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anak, remaja, dan orang tua harus terlibat penuh dalam proses asesmen dan ditanya tentang maksud mereka meminta asesmen. Permintaan asesmen dapat datang dari orang tua, remaja berusia 16 sampai 25 tahun, orang yang mewakili sekolah, wali, profesional di bidang kesehatan dan dinas sosial, praktisi pendidikan usia dini, tim pengendali kenakalan remaja dan pengawas hukuman percobaan.

Program ini harus:

- jelas, ringkas, terbaca, dan bisa diakses oleh orang tua, anak, remaja, dan praktisi;

- spesifik pada kebutuhan khusus, hasil akhir serta bantuan pendidikan, kesehatan, dan perawatan yang dibutuhkan dengan bagian yang diidentifikasi secara jelas;
- suportif untuk menyiapkan poin-poin transisi yang penting; dan
- mudah dibawa.

Orang tua dapat memilih sekolah tertentu yang diinginkan sebagai tempat pendidikan dalam *EHC Plan* karena salah satu prinsip dari juklak yang baru adalah memberi pilihan lebih banyak kepada orang tua dan wali. Selain itu, orang tua dan anak di dalam *EHC Plan* memiliki hak untuk ditempatkan di sekolah luar biasa.

Bantuan Dana Pribadi

Remaja dan orang tua anak berkebutuhan khusus yang memiliki *EHC Plan* berhak untuk meminta bantuan dana pribadi. Bantuan ini dapat meliputi dana pendidikan, perawatan sosial dan kesehatan, tergantung dari kebutuhan sang anak atau remaja. Sebuah komisi bersama dapat dibentuk untuk memungkinkan organisasi yang bekerja sama untuk menyetujui anggaran yang dibutuhkan dan oleh karena itu harus dibuat kebijakan secara lokal yang jelas mengenai bantuan dana pribadi ini. Keluarga atau remaja dapat menerima bantuan dana secara langsung atau dana dapat dipegang oleh lembaga sekolah atau pihak ketiga.

- Bantuan dana pribadi adalah sejumlah dana yang diidentifikasi untuk memberikan bantuan tertentu seperti yang tertera di *EHC Plan*.
- Keluarga dapat meminta bantuan dana pribadi sebagai bagian dari proses pengajuan *EHC Plan* atau selama tinjauan tahunan *EHC Plan*.
- Bantuan dana pribadi dapat meliputi dana pendidikan, perawatan kesehatan dan sosial—dalam dana pendidikan, dana ini dapat dipakai untuk mendapatkan tenaga spesialis atau bantuan pribadi lainnya ketimbang untuk layanan di sekolah yang dapat diperoleh dari *Local Offer*.
- Pemerintah setempat harus menjamin adanya perjanjian di mana setiap bantuan yang diambil oleh orang tua atau remaja menggunakan bantuan dana pribadi akan tersedia di lingkungan sekolah.

Meninjau Kemajuan Murid

Guru kelas dan mata pelajaran yang bekerja sama dengan SENCO harus melakukan asesmen jika anak tidak menunjukkan kemajuan yang berarti, meskipun pengajaran berkualitas tinggi yang menyasar bidang-bidang yang lemah telah dilakukan. Mereka harus melihat dari bukti yang ada dan melakukan analisis yang jelas terhadap kebutuhan murid seperti:

- asesmen dan pengalaman guru terhadap murid;
- informasi tentang kemajuan, pencapaian, dan perilaku murid;
- perkembangan individu dibandingkan dengan rekan sebaya;

- pandangan dan pengalaman orang tua;
- pandangan anak secara pribadi;
- saran penyedia dukungan dari luar.

Peninjauan kemajuan murid akan menentukan dukungan apa yang dibutuhkan anak, misalnya apakah *SEN Support* cukup layak atau harus meminta asesmen untuk *EHC Plan*. Bagi anak dan remaja yang sudah memiliki *EHC Plan*, peninjauan ini akan menentukan kelayakan dari program ini dan mengidentifikasi sasaran di masa depan.

Kewajiban bagi Sekolah secara Hukum

Secara hukum, kewajiban utama sekolah tidak berubah, tetapi cara menjalaninya akan berubah. Sekolah harus terus:

- memenuhi kewajiban dalam *Equality Act* terhadap murid dengan disabilitas;
- dengan sekuat tenaga memenuhi kebutuhan murid berkebutuhan khusus—ini berarti melakukan apa pun dalam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan murid dan remaja dengan kebutuhan khusus;
- menginformasikan kepada orang tua ketika murid mendapat dukungan karena berkebutuhan khusus dan melibatkan mereka dalam meninjau kemajuan mereka;
- menerima remaja, bilamana sekolah tersebut terdaftar dalam *EHC Plan*;
- bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan *Local Offer*; dan
- mengikuti juklak baru 0-25 *SEND Code of Practice*.

Code of Practice (paragraf 9.79) menentukan bahwa sekolah yang terdaftar dalam *EHC Plan* berkewajiban untuk menerima murid, kecuali:

- sekolah tersebut tidak sesuai dengan umur, kemampuan, bakat, atau kebutuhan khusus anak atau remaja tersebut; atau
- kehadiran anak atau remaja tersebut tidak sesuai dengan efisiensi pendidikan anak lain, atau efisiensi penggunaan sumber daya.

Tugas baru yang harus dijalani sekolah adalah:

- membuat dan memublikasikan Laporan Informasi Sekolah tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus *(School SEN Information Report)*;
- menunjuk seorang staf yang berkualifikasi dan berpengalaman sebagai SENCO;
- mengatur supaya murid dengan kondisi medis tertentu mendapat dukungan dan sekolah mematuhi kewajiban hukum dalam mendukung murid dengan kondisi medis tertentu.

Paragraf 6.85 dari juklak menyatakan bahwa:

> *"Seorang SENCO **haruslah** seorang guru berkualifikasi yang mengajar di sekolah. Seorang SENCO baru yang ditunjuk **haruslah** seorang guru yang berkualifikasi, dan jika ia sebelumnya belum pernah menjadi SENCO di sekolah itu atau sekolah lain selama total dua belas bulan, ia **harus** mendapatkan Piagam Nasional Koordinasi Pendidikan Kebutuhan Khusus (National Award in Special Education Needs Co-ordination) setelah tiga tahun penunjukan."*
>
> (DfE, 2014: 97)

Implikasi bagi Komite Sekolah *(School Governors)*

Komite sekolah:

- harus mengikuti juklak ini dan mengawasi pelaksanaan reformasi ini dan menyediakan dukungan strategis bagi kepala sekolah;
- harus memublikasikan informasi tentang kebijakan sekolah tentang kebutuhan khusus di laman sekolah;
- harus memastikan ada seorang guru berkualifikasi yang ditunjuk sebagai SENCO;
- harus bekerja sama dengan pemerintah setempat termasuk dalam mengembangkan *Local Offer* dan ketika sekolah ditunjuk dalam daftar *EHC Plan*;
- harus memastikan pengaturan berjalan baik di sekolah untuk mendukung murid dengan kondisi medis tertentu;
- harus memublikasikan informasi tentang pengaturan penerimaan murid berkebutuhan khusus, langkah yang harus dilakukan untuk mencegah perlakuan diskriminatif terhadap anak dengan disabilitas, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk membantu akses anak dengan disabilitas, serta perencanaan aksesibilitas untuk mereka.

Implikasi bagi Kepala Sekolah

Semua kepala sekolah:

- harus mengambil tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan kebutuhan khusus;
- memastikan SENCO tergabung dalam rapat pimpinan;
- memastikan setiap guru, asisten guru, relawan, dan orang tua mengerti implikasi dari reformasi ini;
- meletakkan aturan yang memastikan supaya orang tua dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan dan meninjau perkembangan anak mereka;
- membuat proses yang memungkin anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berdiskusi tentang kemajuan mereka;

- mematikan adanya proses peninjauan bantuan pendidikan khusus secara teratur;
- mengembangkan kebijakan yang mendukung anak untuk bisa melanjutkan ke pendidikan menengah.

Implikasi bagi SENCO

Seorang SENCO memiliki peran strategis dalam bekerja sama dengan pejabat dalam mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan kebutuhan khusus. SENCO dan tim pimpinan harus memastikan bahwa bantuan tersedia untuk mendukung kebutuhan yang teridentifikasi. Peran tersebut meliputi:

- pengawasan operasi sehari-hari kebijakan pendidikan ABK di sekolah;
- pengoordinasian bantuan bagi ABK;
- menjadi penghubung dengan guru yang menjadi pengawas ABK;
- menjadi penasihat kolega lain mengenai pendekatan SEN *Support*;
- menjadi penasihat dalam penggunaan dana ABK atau sumber daya lain;
- menjadi penghubung dengan orang tua ABK;
- menghubungkan dengan penyedia pendidikan lain dan tenaga profesional dari lembaga lain;
- menjadi penghubung dengan sekolah lain untuk melancarkan transisi dari satu sekolah ke sekolah baru;
- bekerja sama secara strategis dengan kepala sekolah dan komite sekolah untuk memastikan bantuan benar-benar sesuai dengan *Equality Act* dan memenuhi semua kewajiban seperti yang tertera pada juklak;
- mengawasi kualitas pengajaran dan pembelajaran murid dengan kebutuhan khusus sebagai bagian dari pengawasan sekolah secara keseluruhan;
- mengawasi data kemajuan dan pencapaian murid dengan kebutuhan khusus sebagai bagian dari pengawasan sekolah secara keseluruhan;
- memastikan catatan data pendidikan berkebutuhan khusus tersimpan dengan aman dan diperbarui.

Implikasi pada Perawat Sekolah

Jika sekolah memiliki perawat sekolah, maka mereka dapat menjadi bagian yang integral dari keseluruhan pendekatan sekolah terhadap kebutuhan khusus di mana mereka dapat:

- mendukung komunikasi yang efektif dengan semua tenaga profesional, anak, remaja, dan keluarga yang berkaitan dengan hasil kesehatan dan pendidikan;
- menyediakan informasi dan tindakan yang jelas berkaitan dengan kebutuhan kesehatan;

- mengidentifikasi kebutuhan pelatihan khusus berkaitan dengan kebutuhan kesehatan bagi asisten guru;
- mengambil bagian dalam meninjau *EHC Plan*;
- mengklarifikasi peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan kunci; dan
- mendukung rencana peralihan menuju kedewasaan mandiri atau sekolah lanjutan;

Implikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini

Penyedia jasa diharuskan untuk:

- mengikuti standar yang ditentukan dalam kerangka kerja pendidikan anak usia dini, termasuk di dalamnya dukungan untuk ABK;
- memastikan dengan segala upaya supaya ABK mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, memastikan ABK dapat beraktivitas di sekolah bersama dengan anak lain yang tidak berkebutuhan khusus;
- mengadopsi pendekatan *SEN Support* yang baru—mereka tidak butuh untuk melakukan pencatatan *early years action/early years action plus*;
- bekerja sama dengan orang tua/wali dalam mengembangkan rencana dukungan;
- menerima anak, apabila lembaga mereka terdaftar dalam *EHC Plan*;
- bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan *Local Offer*; dan
- memiliki seorang guru berkualifikasi yang ditunjuk sebagai SENCO.

Kewajiban secara Hukum bagi para Guru

Guru kelas atau guru mata pelajaran adalah jantung dari sistem *SEN Support* yang baru. Mereka bertanggung jawab menjadi tenaga penggerak dalam empat tahapan (asesmen, perencanaan, pelaksanaan, peninjauan) dengan panduan bantuan dari SENCO dan staf spesialis lain. Seorang guru kelas harus:

- bertanggung jawab atas seluruh murid termasuk murid berkebutuhan khusus;
- memimpin dalam perencanaan bagi murid berkebutuhan khusus;
- berfokus pada hasil bagi anak;
- bertanggung jawab memenuhi pendidikan berkebutuhan khusus, memanfaatkan secara strategis bantuan dari SENCO untuk mendukung kualitas pengajaran;
- mengevaluasi kualitas intervensi dan bantuan pendidikan lain secara teratur;
- memiliki aspirasi yang tinggi terhadap semua murid: meletakkan sasaran yang jelas dan menantang bagi para murid;
- melibatkan orang tua dan murid dalam merencanakan dan meninjau kemajuan mereka: mendengarkan pendapat mereka dan memberikan pembaruan kemajuan secara teratur.